

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena akan dikenang sepanjang hidupnya. Pernikahan adalah menyatukan dua insan dalam satu keluarga. Pernikahan juga menyatukan dua keluarga besar menjadi jalinan persaudaraan yang semula belum terikat menjadi lebih terikat. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial manusia akan menjalin interaksi dengan sesamanya. Sehingga dari interaksi tersebut akan menimbulkan berbagai peristiwa dan akibat hukum. Salah satunya adalah perkawinan yang merupakan sunnatulloh yang berlaku pada makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, serta tumbuhan. Perkawinan adalah salah satu perintah agama, yang dilaksanakan bagi seseorang yang mampu.

Islam memandang bahwa perkawinan mengandung nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul. Disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia juga melestarikan keturunan dan mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.¹

¹ Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press. Cet 9. hal.13

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Tujuan perkawinan yang dilangsungkan suami-istri adalah untuk sepanjang hayat sampai salah satu atau keduanya meninggal, akan tetapi dalam keadaan tertentu perkawinan harus atau dapat dibatalkan. Misalnya, terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab- sebab lain yang salah satunya karena sebab fasakh atau adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di muka sidang pengadilan.²

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada dasarnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Penjelasan dari ketentuan pasal 22 kata “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau tidak bisa batal, yaitu bilamana ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain.³ Para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

² Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana

³ Lihat penjelasan pasal 22 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁴

Beberapa akibat hukum yang ditimbulkan karena pembatalan perkawinan (*fasakh* nikah) meliputi tentang hak waris mewarisi, perwalian, pemberian nafkah dan status anak (*nasab*). Anak merupakan hasih buah cinta dari suatu perkawinan. Anak juga yang akan meneruskan keturunan, investasi masa depan baik di dunia maupun di akhirat dan penerus perjuangan setelah kita menua atau meninggal.

Sementara pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dinamakan anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Sehingga anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki *nasab* kepada ibunya dan perwaliannya ikut wali hakim. Ketika terjadi pembatalan perkawinan maka akan sangat berdampak kepada status anak yang dilahirkan. Apakah anak tersebut bisa dinamakan anak sah dari pembatalan perkawinan atau anak di luar kawin. Karena menurut penulis, status anak dalam kasus ini sangat

⁴ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

urgen untuk masa depannya baik dalam hak waris – mewarisi, perwalian apabila anak tersebut perempuan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sda merupakan salah satu putusan mengenai pembatalan perkawinan karena saudara seibu. Posita putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sda menyebutkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon I dan Termohon II. Termohon I dan Termohon II lahir dari ibu yang sama akan tetapi dari bapak yang berbeda. Pemohon menikah dengan Kastari dan melahirkan Termohon II, namun Kastari tidak mau tanggung jawab. Setelah itu Pemohon berhubungan dengan Parlin dan hamil Termohon I. Waktu itu Parlin mengaku masih bujang, untuk menutupi aibnya, Parlin menyuruh Nur untuk menikahi Pemohon secara resmi dan berhubungan suami istri. Kemudian Pemohon dengan Nur bercerai setelah Pemohon melahirkan Termohon I. Antara Termohon I dengan Termohon II terpisahkan oleh jarak yakni Termohon I berada di Kecamatan Sukahening Tasikmalaya, sedangkan Termohon II berada di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Pada tanggal 06 Desember 2010 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010. Setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Termohon I dan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kos di Kecamatan Sukodono Kabupaten

Sidoarjo dan sudah memiliki anak berusia 3,5 tahun. Ternyata anak ini hasil dari pernikahan siri yang dilakukan Termohon I dengan Termohon II. Pernyataan ini diketahui dari keterangan Saksi III.⁵

Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah terjadi hubungan sumbang (*incest*) yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung. Ruth. S. Kempe dan C. Henry Kempe mendefinisikan *incest* sebagai hubungan seksual antara anggota keluarga dalam rumah, baik antara kakak-adik kandung atau tiri, ayah-anak kandung, ayah-anak tiri, paman-keponakan kandung atau tiri.⁶ Terdapat lagi tambahan tentang pelaku *incest* menurut definisi yang dinyatakan oleh Ruth S. Kempe dan C. Henry Kempe ini, adanya pelaku yang disebut paman, keponakan adik tiri, anak tiri, dan kakak tiri.

Sehingga menurut penulis, perlu kejelasan tentang status anak yang dilahirkan dari perkawinan *incest* atau perkawinan saudara seibu. Hal ini menimbulkan masalah baru bagi anak tersebut, baik dalam nasab, perwalian jika anak tersebut perempuan, pewarisan dan sebagainya dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif. Oleh karena itu, perlu kiranya penulis memahami secara mendalam tentang status anak akibat pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif, serta bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam

⁵ Salinan Putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA. Sda

⁶ Sulaiman Zuhdi Manik. 2002. *Penanganan dan Pendampingan Anak Korban Incest*. PKPA. hal. 37

menanggapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga, penulis merasa tertarik untuk mengangkat sebuah judul skripsi yang berjudul sebagai berikut :
Analisa Yuridis Terhadap Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Saudara Seibu (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 978/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sda).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Putusan No: 978/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sda?
2. Bagaimana perbandingan status anak akibat pembatalan perkawinan karena saudara seibu antara Hukum Islam dengan Hukum Positif ?

C. Tujuan

Tujuan Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Putusan No: 978/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sda
2. Untuk mengetahui perbandingan status anak akibat pembatalan perkawinan karena saudara seibu antara Hukum Islam dengan Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Atas dasar latar belakang, maksud dan tujuan sebagaimana penulis uraikan diatas maka penulis berharap karya tulis ini dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dalam hukum Islam dan hukum positif. Serta, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi, teori-teori serta menambahkan pengetahuan ilmu hukum Islam dan hukum positif.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan mengembangkan cakrawala berpikir penulis, khususnya menyangkut status anak akibat pembatalan perkawinan karena saudara seibu.

b. Bagi Masyarakat

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran pada masyarakat luas tentang status anak akibat pembatalan perkawinan karena saudara seibu.

E. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.⁷ Sebuah penelitian tidak akan lepas dari sebuah metode yang akan digunakan, dalam kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan maka metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif.⁸ Menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti undang-undang dan didukung dengan literatur yang ada mengenai pokok masalah, melihat hukum sebagai norma yang ada di masyarakat. Peneliti perlu menggunakan pendekatan dalam setiap analisisnya. Pendekatan ini bahkan akan dapat menentukan nilai dari hasil penelitian tersebut.⁹ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰

⁷ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal.12.

⁸ Soejono Soekamto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press. hal. 13-14

⁹ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 184

¹⁰ *Ibid.* hal. 52

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 978/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sda.
2. Al Qur'an, Hadist dan Kitab- kitab fikih.
3. Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat” mengatakan bahwa bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas Buku-buku yang membicarakan mengenai hukum, kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim.¹²

¹¹ Ibid. hal. 42-43

¹² H. Zainudin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hal.54

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti dalam melakukan penelitian hukum, baik dalam membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta kerangka teori. Bahan hukum sekunder tersebut dapat membantu peneliti dalam menyusun argumentasi yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang penelitian. Bahan sekunder diperoleh peneliti dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal-jurnal, makalah atau sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari pustaka, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, kamus dan lain-lain.¹³

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a) Kepustakaan

Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat

¹³ *Ibid*

dilakukan dengan membaca, melihat dan mendengarkan penelusuran terhadap isu-isu hukum.¹⁴

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan pada sifat penelitian ini, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan oleh karena penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder belaka.

Analisis bahan hukum adalah pengolahan menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu baik berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Analisis yuridis normatif terhadap putusan pengadilan agama yang dikaji oleh peneliti.

Setelah data-data yang diperlukan di dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya akan diolah dan dibahas dengan menggunakan *comparative analiysis* atau *sincronation analiysis* yaitu membandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum Positif dalam menganalisa masalah tersebut.

¹⁴ Dr Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Op.Cit.* hal.160

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan dan tinjauan umum tentang status anak dalam hukum Islam dan hukum Positif.

BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis yaitu deskripsi kasus yang diangkat oleh penulis sesuai dalam salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 978/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sda. dan dianalisa menggunakan *comparative analiysis*

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisi saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian.

